

Peningkatan Kapasitas Manajerial SDM Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Bandung

Nurhayat Indra

Universitas Koperasi Indonesia

nurhayatindra@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajerial SDM Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Bandung, khususnya dalam materi penyusunan rencana strategis KJK/KJKS sebagai salah satu unit kompetensi manajer KJK/KJKS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan manajer koperasi sesuai dengan standar SKKNI-BNSP, yang nantinya akan siap mengikuti uji kompetensi. Metode pelatihan dilakukan dengan metode bimbingan teknis berbasis Modul dan Kertas Kerja dengan kode unit kompetensi KJK.SP01.006.01- Menyusun Perencanaan Strategis. Hasil evaluasi pelatihan dari capaian pembelajaran dalam peningkatan kompetensi peserta masih belum optimal.

Kata Kunci: Pelatihan Berbasis Kompetensi, KJK/KJKS, Manajer, SKKNI

ABSTRACT

Implementation of Community Service through training on Increasing the Managerial Capacity of Savings and Loan Cooperative HR Managers in Bandung Regency, especially in the material for preparing the KJK/KJKS strategic plan as one of the competency units for KJK/KJKS managers aims to improve competency both knowledge, attitude, and skills of cooperative managers in accordance with SKKNI-BNSP standards, which will be ready to take the competency test. The training method is carried out using a module-based technical guidance method and working papers with the competency unit code KJK.SP01.006.01- Developing Strategic Planning. The results of the training evaluation of learning outcomes in increasing the competence of participants are still not optimal.

Keywords: Competency Based Training, KJK/KJKS, Managers, SKKNI

I. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, merupakan salah satu mitra LPPM-Universitas Koperasi Indonesia dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) bagi para dosen dan mahasiswa Ikopin *University*. Pada tahun 2022 kegiatan PkM yang diprogramkan adalah kegiatan Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas manajerial bagi SDM Koperasi (Pengurus, Pengawas, dan Pengelola) yang bergerak di sektor keuangan

mikro yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP atau Koperasi Jasa Keuangan KJK) pola konvensional maupun Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS).

Baik KSP/KJK maupun KSPPS/KJKS memiliki peran yang strategis dalam menyediakan pinjaman dan pembiayaan bagi para anggotanya sebagai modal usaha yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, KJK dan KJKS di Kabupaten Bandung pada umumnya berskala kecil yang

secara manajerial belum dikelola secara profesional, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap peluang-peluang usaha di sektor simpan pinjam yang tumbuh dengan pesat. Sementara kehadiran Lembaga keuangan mikro non koperasi yang memberikan pinjaman *online* (Pinjol) terus tumbuh dan menggerogoti pangsa pasar KJK/KJKS Koperasi.

Kondisi ini sangat disadari sepenuhnya oleh Dinas KUKM, Kabupaten Bandung untuk merancang program Pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas manajerial SDM KJK dan KJKS. Program pelatihan dirancang salah satunya adalah pelatihan kompetensi manajer KJK dan KJKS profesional yang dipersiapkan untuk menuju sertifikasi. Program pelatihan sertifikasi manajer tersebut yang diselenggarakan pada tahun 2022 bekerja sama dengan LPPM-Ikopin ini, adalah Angkatan yang ke-3. Sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), seorang manajer KSP/KSPPS profesional harus memiliki Sembilan (9) elemen kompetensi, yaitu: (1) Prinsip-prinsip Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJK/KJKS); (2) Menyusun Perencanaan Strategis; (3) Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB); (4) Menganalisis Program Kerja dan RAPB; (5) Pengendalian Internal; (6) Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan; (7) Menilai Tingkat Kesehatan KJK/KJKS; (8) Kemitraan dan Negosiasi; serta (9) Presentasi.

Pelaksanaan proses PkM yang dilaporkan pada jurnal ini, adalah hasil pelaksanaan pelatihan kompetensi manajer KJK/KJKS untuk elemen kompetensi Penyusunan Rencana Strategis KJK/KJKS.

Kelompok Sasaran, Tujuan Dan Luaran

1. Kelompok Sasaran

Sesuai dengan unit kompetensinya, kelompok sasaran dalam pelatihan ini adalah sebanyak 40 orang manajer KJK/KJKS yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, pada realitanya peserta pelatihan menjadi heterogen, campuran antara representasi dari pengurus, pengawas, manajer/pengelola, bahkan ada karyawan yang dipersiapkan koperasi untuk menjadi manajer.

2. Tujuan

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) peserta sebagai manajer KJK/KJKS profesional sesuai dengan SKKNI Manajer KJK/KJKS khususnya pada unit kompetensi penyusunan rencana strategis KJK/KJKS.

3. Luaran

Seluruh peserta diharapkan siap mengikuti sertifikasi manajer KJK/KJKS dan seluruhnya dinyatakan kompeten sebagai manajer KJK/KJKS.

II. METODE

Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis KJK/KJKS ini merupakan pelatihan berbasis kompetensi, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode bimbingan teknis terstruktur, menggunakan modul dan kertas kerja penyusunan strategis KJK/KJKS dari LSP KJK/KJKS. Waktu yang diberikan oleh panitia untuk menuntaskan unit kompetensi ini adalah 3 JPL, setara dengan 135 menit. Adapun proses pelatihan dan bimbingan teknis yang dimaksud secara rinci disajikan pada matriks berikut.

Tabel 1.
Tahapan dan Proses Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis KJK/KJKS
Peningkatan Kapasitas Manajerial SDM KJK/KJKS
Kabupaten Bandung Angkatan Ke-3

No	Materi Pokok Bahasan	Waktu	Metode	Media Belajar
1	Pengantar: tujuan dan elemen kompetensi yang harus dimiliki manajer KJK/KJKS)	5 Menit	Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> • Modul Rencana Strategis • PPT • LCD
2	1. Merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai koperasi jasa keuangan 2. Melakukan analisis lingkungan 3. Menetapkan Rencana Strategis 4. Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi 5. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan perencanaan strategis	45 Menit	Ceramah	<ul style="list-style-type: none"> • Modul Rencana Strategis • PPT • LCD
3	Praktik Menyusun Rencana Strategis KJK/KJKS 1) Merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai koperasi jasa keuangan 2) Melakukan analisis lingkungan 3) Menetapkan Rencana Strategis 4) Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi 5) Melaporkan hasil kegiatan penyusunan perencanaan strategis	70 Menit	Bimbingan Teknis dan Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kertas Kerja • Modul Rencana Strategis • PPT • LCD
4	Evaluasi	15 Menit	Tanya Jawab Uji Petik Kertas Kerja	Kertas Kerja Yang sudah dilengkapi (diisi)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan metode yang sudah dijelaskan di metode kegiatan, pelatihan peningkatan kapasitas manajerial SDM KJK/KJKS dalam kegiatan PkM ini adalah pelatihan berbasis kompetensi dengan kode unit kompetensi KJK.SP01.006.01-Menyusun Perencanaan Strategis. Merujuk kepada SKKNI yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Kementrian Tenaga Kerja, kompetensi didefinisikan sebagai “rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan”. Lebih lanjut, BNSP juga menjelaskan substansi mengenai unit kompetensi yang dimiliki oleh seseorang mencakup hal-hal berikut:

1. *outcome* dari sebuah pekerjaan secara spesifik,
2. kondisi di mana unit kompetensi tersebut dilaksanakan,
3. pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja sesuai standar,
4. bukti yang dapat dikumpulkan untuk menentukan kompeten atau belum kompetennya seseorang yang melaksanakan aktivitas dalam unit kompetensi tersebut.

Oleh karena itu, para instruktur pelatihan berbasis kompetensi dan para *asesor* yang akan melaksanakan *assesmen* uji kompetensi diharapkan mampu melakukan penilaian dan evaluasi secara komprehensif terhadap peserta pelatihan maupun peserta uji kompetensi. BNSP Kemenaker (2018) memberikan panduan penilaian bagi para instruktur dan asesor dalam penilaian atau asesmen kompetensi baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Konteks penilaian:** “memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, serta di mana, apa dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan”.
2. **Persyaratan kompetensi:** “memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai/dipenuhi sebelumnya (jika diperlukan) sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi”.
3. **Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:** “merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi”.
4. **Sikap kerja yang diperlukan:** “merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan untuk tercapainya

kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi”.

5. **Aspek kritis:** “memberikan penjelasan tentang aspek atau kondisi yang sangat memengaruhi atau menentukan keberhasilan pelaksanaan unit kompetensi”.

Jika merujuk kepada pedoman penilaian dan evaluasi pelatihan berbasis kompetensi dari BNSP tersebut, maka penilaian mengenai capaian pembelajaran dari setiap peserta pelatihan yang mencakup peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta dalam Menyusun Perencanaan Strategis KJK/KJKS harus dilakukan secara cermat dan teliti. Namun demikian, dengan jumlah peserta pelatihan yang lebih dari 40 orang, serta dengan waktu yang cukup singkat (hanya dalam 3 JPL), serta latar belakang pekerjaan peserta di koperasi dan pendidikan mereka yang heterogen, hal ini menjadi kendala dan faktor kritis yang belum dapat dilakukan secara optimal oleh penulis sebagai instruktur. Penilaian dan evaluasi baru dapat dilakukan terbatas berdasarkan pengamatan umum dan uji petik dari pengisian kertas kerja beberapa orang peserta.

Kategori penilaian dan evaluasi pelatihan dalam kegiatan PkM ini, secara kualitatif terdiri dari empat (4) kategori, yaitu: tuntas, cukup tuntas, kurang tuntas, dan tidak tuntas. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. **Tuntas:** seluruh peserta mampu mengisi lembar kertas kerja sesuai dengan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja secara benar, tepat dan lengkap sesuai dengan arahan dan bimbingan instruktur.
2. **Cukup tuntas:** masih ada sebagian peserta yang belum mampu mengisi lembar kertas kerja sesuai dengan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja secara benar, tepat dan lengkap sesuai dengan arahan dan bimbingan instruktur.
3. **Kurang tuntas:** Sebagian besar peserta belum mampu mengisi lembar kertas

- kerja sesuai dengan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja secara benar, tepat dan lengkap sesuai dengan arahan dan bimbingan instruktur.
4. **Tidak tuntas:** seluruh peserta belum mampu mengisi lembar kertas kerja sesuai dengan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja secara benar, tepat dan lengkap

sesuai dengan arahan dan bimbingan instruktur.

Secara lengkap deskripsi mengenai hasil penilaian dan evaluasi kompetensi pelatihan Penyusunan Rencana Strategis bagi manajer KJK/KJKS Kabupaten Bandung Angkatan ke-3 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.
Capaian Kualitatif Elemen Kompetensi dan Kriteria untuk Kerja Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis KJK/KJKS Peningkatan Kapasitas SDM KJK/KJKS Kabupaten Bandung Angkatan Ke-3

Pokok Bahasan dan Elemen Kompetensi	Sub Pokok Bahasan Kriteria Unjuk Kerja	Kualitas Capaian Peserta di Kelas
1. Merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai koperasi jasa keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Visi dan misi dirumuskan. • Tujuan organisasi dirumuskan. • Nilai-nilai koperasi jasa keuangan diidentifikasi dan dirumuskan. 	Tuntas
2. Melakukan analisis lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen lingkungan internal diidentifikasi. • Komponen lingkungan eksternal diidentifikasi. • Komponen lingkungan Internal dan eksternal dianalisis. 	Cukup Tuntas
3. Menetapkan perencanaan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan strategis dirumuskan. • Skala prioritas atas rumusan strategi ditetapkan. • Perencanaan strategis disosialisasikan. 	Kurang Tuntas
4. Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator kinerja ditetapkan. • Instrumen sistem monitoring dan evaluasi dipersiapkan. • Sistem monitoring dan evaluasi ditetapkan. • Sistem monitoring dan evaluasi disosialisasikan. 	Tidak Tuntas
5. Melaporkan hasil kegiatan penyusunan perencanaan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Format laporan disiapkan. • Laporan hasil kegiatan penyusunan perencanaan strategis dibuat dan dilaporkan. 	Tidak Tuntas

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, capaian pembelajaran yang diperoleh para peserta pelatihan ini adalah masih belum mampu mencapai ketuntasan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) dalam menyusun perencanaan strategis KJK/KJKS seperti yang diharapkan dari pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar SKKNI. Hal ini nampaknya belum menjadi perhatian Dinas KUKM Kabupaten Bandung untuk merespon sasaran dan rekomendasi dari

laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan serupa yang ditulis oleh Nurhayat Indra dan Lely Savitri Dewi (2021), yang merekomendasikan, bahwa “Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan anggaran Dinas Koperasi dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian ke depan maka sebaiknya perlu memperhatikan: (1) Kriteria peserta sesuai dengan tujuan pelatihan dan bimbingan teknis; (2) Pemberian bobot JPL pada materi harus

memperhatikan keluasan dan kedalaman materi, untuk menghindari penjejalan materi yang tidak sesuai dengan prinsip Pendidikan orang dewasa; serta (3) Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis untuk peserta, sebaiknya tidak lebih dari 25 orang per kelas rombongan belajar”.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan PkM kerja sama antara LPPM Ikopin dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung yang dikemas dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kompetensi peningkatan kapasitas SDM Koperasi dalam penyusunan rencana strategis KJK/KJKS angkatan ke-3 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, meskipun capaian pembelajaran dalam peningkatan kompetensi peserta masih belum optimal.

Saran

Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan anggaran Dinas Koperasi dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian ke depan maka sebaiknya perlu memperhatikan prinsip-prinsip Pendidikan orang dewasa, seperti:

1. Jumlah peserta dalam satu kelas rombongan belajar maksimal 30 orang,
2. Seleksi peserta perlu berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan untuk manajer KJK/KJKS, serta
3. Memberikan waktu JPL yang lebih panjang untuk menghindari pemberian

materi yang berjejal yang kurang memberikan waktu penyerapan materi secara bertahap.

BIBLIOGRAFI

- Agus Winarti.2018. Pendidikan Orang Dewasa (Konsep dan Aplikasi). Penerbit ALFABETA. Cv. Gegerkalong Hilir. Bandung.
- Basleman at all, 2011. *Teori Belajar Orang Dewasa*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Irawan D Surajat. 2016. Menyusun Rencana Strategis. KJK.SP01.006.01. LSP Koperasi.
- Modul Pelatihan Sertifikasi Pengurus dan Manajer KJK/KJKS, LSP yang sudah distandarisasi BNSP.
- Nurhayat Indra dan Lely Savitri Dewi, 2021. ‘Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Bagi Pengurus Dan Manajer Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Bandung’. *Jurnal PKM, E-Coop-Day*. Vol 3 No 1 hal 37, E-ISSN 27763803, LPPM-Ikopin.
- Taufiqurrohman, 2016. *Manajemen Strategik*. Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Mustopo.
- Web. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung.
<https://skkni.kemnaker.go.id/tentang-skkni/struktur>